



Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2020-2024

I Made Agus Amartayoga^{1*}, M. Irwan², Wahidin³

^{1*3} Ekonomi Pembangunan, Universitas Mataram, Indonesia

Alamat : Jalan Majapahit No. 62, Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

Email: agusmrtayoga@gmail.com¹, dae_irwan@unram.ac.id², wahidin.feb@unram.ac.id³

Korespondensi Penulis: agusmrtayoga@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the financial performance of the Mataram City Government during 2020-2024 using the fiscal decentralization ratio, fiscal dependency ratio, regional independence ratio, PAD effectiveness ratio, regional financial efficiency ratio, expenditure harmony ratio, and growth ratio. This research employed a descriptive quantitative approach using documentation data obtained from regional financial reports. The results indicate that the fiscal decentralization ratio was relatively low at 28.35%, while the fiscal dependency ratio remained very high at 69.06%. The regional independence ratio of 41.05% reflected a consultative relationship pattern. The PAD effectiveness ratio reached 109.01%, indicating very effective performance, whereas the regional financial efficiency ratio of 99.08% was categorized as efficient. The expenditure structure was dominated by operational expenditure (82.60%) compared to capital expenditure (15.32%). Furthermore, PAD growth showed a positive but fluctuating trend. These findings suggest that efforts to strengthen fiscal independence through PAD optimization and improved expenditure management remain necessary.*

Keywords: *Financial Performance, Fiscal Decentralization, Fiscal Independence, PAD Effectiveness, Regional Finance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram tahun 2020-2024 dilihat dari rasio desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan fiskal, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian belanja, dan rasio pertumbuhan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data berupa dokumentasi dan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Mataram tergolong rendah dengan rata-rata sebesar 28,35%, sedangkan rasio ketergantungan fiskal tergolong sangat tinggi dengan rata-rata sebesar 69,06%. Rasio kemandirian daerah sebesar 41,05% menunjukkan pola hubungan konsultatif. Rasio efektivitas PAD sebesar 109,01% termasuk kategori sangat efektif, sedangkan rasio efisiensi keuangan daerah sebesar 99,08% tergolong efisien. Rasio keserasian belanja menunjukkan dominasi belanja operasional sebesar 82,60% dibandingkan belanja modal sebesar 15,32%. Selain itu, rasio pertumbuhan PAD menunjukkan tren positif namun fluktuatif dan cenderung melambat pada akhir periode penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota Mataram perlu meningkatkan optimalisasi PAD, pengendalian belanja daerah, serta proporsi belanja modal guna meningkatkan kemandirian dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Kata kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, Keuangan Daerah.

1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta keuangan daerah secara mandiri (Lantowa & Yahya, 2023). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah merupakan hak,

Received: agustus 15, 2026; Revised: agustus 20, 2026; Accepted: September 12 ,2026; Online Available: September 20, 2026; Published: Oktober 06 2026

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas fiskal daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan menjadi salah satu indikator penting untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Siswanto & Maylani, 2022). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri, maka semakin baik pula tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut.

Kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengendalikan belanja daerah, serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Pengukuran kinerja keuangan daerah menjadi penting karena dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2018). Analisis kinerja keuangan daerah umumnya dilakukan melalui berbagai rasio keuangan, seperti rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan fiskal, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian belanja, dan rasio pertumbuhan PAD.

Pemerintah daerah di Indonesia masih menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), realisasi Transfer ke Daerah meningkat dari Rp762,53 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp881,43 triliun pada tahun 2023, sebelum sedikit menurun menjadi Rp863,54 triliun pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah belum sepenuhnya mampu mengurangi beban fiskal pemerintah pusat. Oleh karena itu, setiap daerah dituntut untuk membiayai urusannya sendiri melalui optimalisasi potensi sumber penerimaan yang dimiliki secara efektif dan efisien. Kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber penerimaannya sendiri menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah (Wulandari et al., 2023).

Kota Mataram sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, dan aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan. Sebagai daerah dengan tingkat aktivitas ekonomi yang relatif tinggi, Kota Mataram diharapkan memiliki kemampuan fiskal yang baik dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Natalia & Harsono, 2025). Perkembangan Pendapatan Daerah dari Kota Mataram dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Mataram 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Description	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Asli Daerah	363,17	392,56	446,32	493,30	524,64
Pendapatan Transfer	971,12	970,24	1.051,64	1.171,25	1.224,19
Pendapatan Lainnya	61,71	57,08	2,30	3.750	75,04
Total Pendapatan Daerah	1.396.01	1.419.89	1.500.28	1.668,28	1.823.87
Belanja Operasi	1.113,41	1.184,11	1.287,77	1.369,46	1.417,56
Belanja Modal	209.06	185,54	174,00	281,98	352,04
Total Belanja Daerah	1.456,53	1.382,35	1.464,16	1.653,35	1.769,61

Sumber data: BKD Kota Mataram

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram selama periode 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan, namun pendapatan transfer masih mendominasi total pendapatan daerah sehingga menunjukkan tingkat ketergantungan yang masih tinggi terhadap Pemerintah Pusat. Dari sisi belanja, alokasi anggaran masih didominasi oleh belanja operasi dibandingkan belanja modal, meskipun belanja modal mengalami peningkatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemandirian fiskal daerah Kota Mataram belum optimal dan struktur anggaran belum sepenuhnya mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, kinerja keuangan Kota Mataram masih menghadapi berbagai kelemahan. Penelitian yang dilakukan (Wulandari et al., 2023) menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah mulai meningkat, namun pelaksanaan desentralisasi fiskal masih rendah. Efektivitas PAD tergolong baik karena mampu melampaui target, sedangkan efisiensi masih berfluktuasi. Sementara itu, dari sisi solvabilitas, pemerintah daerah dinilai mampu memenuhi kewajiban dengan aset yang dimiliki. Selanjutnya, penelitian (Natalia & Harsono, 2025) menunjukkan bahwa rasio

kemandirian keuangan daerah masih rendah dengan pola hubungan konsultatif, keserasian belanja kurang baik, efektivitas tergolong baik, namun efisiensi masih rendah.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram jika dilihat dari derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian belanja, dan rasio pertumbuhan PAD. Pendekatan yang lebih komprehensif ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kota Mataram pada periode 2020-2024

2. KAJIAN TEORITIS

2.1. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan pemerataan pembangunan. Menurut Oates (1972), desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi ekonomi karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal dibandingkan pemerintah pusat (Rizal, 2022).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia diwujudkan melalui pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber penerimaan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta melalui transfer dana dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Keberhasilan desentralisasi fiskal dapat dilihat dari kemampuan daerah dalam meningkatkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Halim, 2001).

2.2. Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, serta mempercepat pembangunan daerah (Mardiasmo, 2018).

Menurut Halim (2001), keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh tingkat kemandirian keuangan daerah. Daerah yang mampu menggali dan mengelola sumber pendapatannya sendiri dengan baik akan memiliki tingkat kemandirian fiskal yang lebih tinggi. Sebaliknya, tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih terbatas dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan daerah.

2.3. Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kinerja keuangan daerah merupakan gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui analisis rasio keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Analisis tersebut bertujuan untuk menilai tingkat kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah (Halim, 2001; Mardiasmo, 2018).

Beberapa rasio yang umum digunakan dalam analisis kinerja keuangan daerah meliputi rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan fiskal, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian belanja, dan rasio pertumbuhan PAD. Semakin baik hasil rasio keuangan daerah, maka semakin baik pula kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara mandiri dan berkelanjutan (Mahmudi, 2019; Mahsun, 2006).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat tepatnya di Badan Keuangan Daerah (BKD Kota Mataram dengan periode waktu penelitian tahun 2020-2024. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yang

bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diterbitkan oleh BKD Kota Mataram. Data ini dianalisis menggunakan berbagai rasio keuangan yaitu Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Fiskal, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian Belanja Daerah, dan Rasio Pertumbuhan PAD.

Pengukuran kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa rasio sebagai berikut:

a. Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa tinggi Pendapatan Asli Daerah terhadap dana Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, sehingga tingkat kemandirian fiskal daerah semakin baik (Eka Putri & Munandar, 2021). Rumus yang digunakan adalah:

$$DDF = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2 Ukuran Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Kemampuan Keuangan	Derajat Desentralisasi Fiskal (%)
Sangat Kurang	0-10
Kurang	10-20
Cukup	20-30
Sedang	30-40
Baik	40-50
Sangat Baik	>50

Sumber: (Mahmudi, 2019)

b. Rasio Ketergantungan Fiskal

Rasio Ketergantungan Fiskal digunakan untuk mengukur seberapa tinggi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin besar ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Rumus yang digunakan adalah:

$$RKF = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Transfer}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3 Ukuran Rasio Ketergantungan Fiskal

Kriteria	Ketergantungan Fiskal (%)
Sangat Rendah	0 -10
Rendah	10 -20
Sedang	20 -30
Cukup Tinggi	30 -40
Tinggi	40 -50
Sangat Tinggi	>50

Sumber: (Mahmudi, 2019)

c. Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian Daerah digunakan untuk mengukur kemampuan fiskal pemerintah daerah tanpa bergantung dari dana transfer dan pinjaman daerah. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri semakin baik (Remanta et al., 2024). Rumus yang digunakan adalah:

$$RKD = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 4 Ukuran Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Kategori
Sangat Rendah	0 -25%	Instruktif
Rendah	25 -50%	Konsultatif
Tinggi	50 -75%	Partisipatif
Sangat Tinggi	75 -100%	Delegatif

Sumber: (Mahmudi, 2019)

d. Rasio Efektivitas PAD

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan pemerintah daerah. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa realisasi PAD mampu mencapai atau melampaui target yang ditetapkan (Rhamadani et al., 2025). Rumus yang digunakan adalah:

$$R. \text{Efektif} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 5 Ukuran Rasio Efektivitas PAD

Efektivitas (%)	Kategori
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90 - 99%	Cukup Efektif
75 - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: (Mahmudi, 2019)

e. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah. Semakin rendah rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi yang semakin baik dalam pengelolaan pendapatan daerah (Mohamad Mahsun, 2006). Rumus yang digunakan adalah:

$$R. Efisien = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 6 Ukuran Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi (%)	Kategori
>100%	Tidak Efisien
100%	Seimbang
<100%	Efisien

Sumber: (Mahsun, 2006)

f. Kecerasan Belanja Daerah

Rasio keserasian belanja daerah digunakan untuk melihat proporsi belanja operasi dan belanja modal dalam struktur belanja daerah. Rasio ini menunjukkan proporsi alokasi belanja, di mana semakin besar belanja modal mencerminkan perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan (Mahmudi, 2019). Rumus yang digunakan adalah:

$$R. Operasi = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasional}}{\text{Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$R. Modal = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$$

g. Pertumbuhan PAD

Rasio ini digunakan untuk mengukur pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun. Rasio ini menunjukkan perkembangan PAD dari tahun ke tahun, di mana nilai positif menunjukkan peningkatan (Rhamadani et al., 2025). Rumus yang digunakan adalah:

$$R. Pertumbuhan = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\%$$

Tabel 7 Ukuran Rasio Pertumbuhan PAD

Pertumbuhan (%)	Kriteria
<0%	Negatif
0-25%	Rendah
25-50%	Tinggi
>50%	Sangat Tinggi

Sumber: (Mahmudi, 2019)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal digunakan untuk mengukur kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah.

Tabel 8 Perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Mataram Tahun 2020-2024

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio	Kriteria
2020	363.165.361.010,56	1.396.009.615.374,56	26.01%	Cukup
2021	392.556.124.241,49	1.419.886.218.959,26	27.65%	Cukup
2022	446.332.721.389,05	1.500.283.093.258,05	29.75%	Cukup
2023	493.302.232.061,10	1.668.282.889.314,10	29.57%	Cukup
2024	524.644.058.354,99	1.823.872.375.449,99	28.77%	Cukup
Rata-Rata			28,35%	Cukup

Sumber data: BKD Kota Mataram (Data diolah)

Berdasarkan Tabel diatas, rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Mataram selama tahun 2020-2024 berada pada kategori cukup dengan rata-rata sebesar 28,35%. Rasio tersebut mengalami peningkatan dari 26,01% pada tahun 2020 menjadi 29,75% pada tahun 2022, hal ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 tidak mempengaruhi pertumbuhan PAD hanya saja mempengaruhi Pendapatan Transfer. Pada tahun berikutnya kembali menurun menjadi 28,77% pada tahun 2024 yang dimana pada masa itu adalah masa pemulihan pasca pandemi yang meningkatkan Pendapatan Transfer secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih relatif terbatas.

Fluktuasi rasio tersebut mengindikasikan bahwa struktur pendapatan daerah Kota Mataram masih didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Menurut Halim (2001), rendahnya kontribusi PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah yang masih rendah. Dengan demikian, Pemerintah Kota Mataram belum sepenuhnya mampu melaksanakan desentralisasi fiskal secara optimal karena ketergantungan terhadap dana transfer masih cukup tinggi.

4.2. Rasio Ketergantungan Fiskal

Rasio Ketergantungan Fiskal digunakan untuk mengukur kontribusi Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan Daerah. Rasio ini menunjukkan tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat.

Tabel 9 Perhitungan Rasio Ketergantungan Fiskal Kota Mataram Tahun 2020-2024

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio	Kriteria
2020	971.125.111.760,00	1.396.009.615.374,56	69.56%	Sangat Tinggi
2021	970.243.717.002,00	1.419.886.218.959,26	68.33%	Sangat Tinggi
2022	1.051.642.188.665,00	1.500.283.093.258,05	70.10%	Sangat Tinggi
2023	1.171.230.657.253,00	1.668.282.889.314,10	70.21%	Sangat Tinggi
2024	1.224.188.714.634,00	1.823.872.375.449,99	67.12%	Sangat Tinggi
Rata-Rata			69,06%	Sangat Tinggi

Sumber data: BKD Kota Mataram (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 9, rasio ketergantungan fiskal Kota Mataram selama tahun 2020-2024 tergolong tinggi dengan rata-rata sebesar 69,06%. Rasio tersebut mencapai 69,56% pada tahun 2020, kemudian mengalami fluktuasi hingga menurun menjadi 67,12% pada tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan pada beberapa periode, pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih mendominasi struktur pendapatan daerah Kota Mataram.

Tingginya rasio ketergantungan fiskal menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbatas. Menurut Halim (2001), tingginya ketergantungan terhadap dana transfer mencerminkan rendahnya kapasitas fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Mataram belum sepenuhnya mampu mewujudkan kemandirian fiskal, sehingga diperlukan optimalisasi sumber-sumber PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

4.3. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan dan aktivitas pemerintahan tanpa bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat.

Tabel 10 Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah Kota Mataram Tahun 2020-2024

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio	Kriteria	Kategori
2020	363.165.361.010,56	971.125.111.760,00	37.40%	Rendah	Konsultatif
2021	392.556.124.241,49	970.243.717.002,00	40.46%	Rendah	Konsultatif
2022	446.332.721.389,05	1.051.642.188.665,00	42.44%	Rendah	Konsultatif
2023	493.302.232.061,10	1.171.230.657.253,00	42.12%	Rendah	Konsultatif

2024	524.644.058.354,99	1.224.188.714.634,00	42.86%	Rendah	Konsultatif
Rata-Rata			41,05%	Rendah	Konsultatif

Sumber data: BKD Kota Mataram (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 10, rasio kemandirian keuangan daerah Kota Mataram selama tahun 2020–2024 berada pada kategori rendah dengan pola hubungan konsultatif dan rata-rata sebesar 41,05%. Rasio tersebut mengalami peningkatan dari 37,40% pada tahun 2020 menjadi 42,86% pada tahun 2024, meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah mulai mengalami peningkatan, namun peran pemerintah pusat dalam pembiayaan daerah masih cukup dominan.

Peningkatan rasio kemandirian dipengaruhi oleh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama yang bersumber dari pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah yang memberikan kontribusi cukup besar antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selain itu, pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) juga menjadi salah satu penyumbang utama pada komponen lain-lain PAD yang sah.

Meskipun PAD mengalami peningkatan setiap tahun, kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih relatif terbatas dibandingkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Menurut Halim (2001), rasio kemandirian pada kisaran 25%–50% menunjukkan pola hubungan konsultatif, dimana pemerintah daerah mulai mampu membiayai sebagian kebutuhannya namun masih memerlukan dukungan pemerintah pusat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Mataram perlu terus mengoptimalkan sumber-sumber PAD melalui peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, pengembangan sektor ekonomi potensial, serta penguatan pengelolaan penerimaan daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal secara bertahap.

4.4. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang ditargetkan. Berikut ini merupakan hasil perhitungan rasio efektivitas PAD.

Tabel 11 Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah Kota Mataram Tahun 2020-2024

Tahun	PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Rasio	Kriteria
2020	363.165.361.010,56	306.337.291.261,15	118.55%	Sangat Efektif
2021	392.556.124.241,49	370.608.032.419,00	105.93%	Sangat Efektif
2022	446.332.721.389,05	422.308.562.050,00	105.69%	Sangat Efektif
2023	493.302.232.061,10	447.862.217.089,00	110.15%	Sangat Efektif
2024	524.644.058.354,99	500.893.100.610,00	104.74%	Sangat Efektif
Rata-Rata			109,01%	Sangat Efektif

Sumber data: BKD Kota Mataram (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 11, rasio efektivitas PAD Kota Mataram selama tahun 2020–2024 tergolong sangat efektif dengan rata-rata sebesar 109,01%. Rasio efektivitas PAD mencapai 118,55% pada tahun 2020, kemudian mengalami fluktuasi hingga sebesar 104,74% pada tahun 2024, namun tetap berada di atas 100%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Mataram memiliki kemampuan yang baik dalam merealisasikan bahkan melampaui target PAD yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2018), rasio efektivitas di atas 100% menunjukkan kinerja yang sangat efektif dalam merealisasikan target pendapatan daerah. Tingginya efektivitas PAD tersebut didukung oleh kontribusi Pajak Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Tabel 12 Rata-Rata Rasio Efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Lain-Lain PAD yang Sah Kota Mataram Tahun 2020-2024

Rata-Rata Pajak Daerah	106,29%
Rata-Rata Retribusi Daerah	55,50%
Rata-Rata Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	107,66%
Rata-Rata Lain-Lain PAD yang Sah	122,29%

Sumber data: BKD Kota Mataram (Data diolah)

Berdasarkan Tabel diatas, tingginya efektivitas PAD Kota Mataram didukung oleh realisasi beberapa komponen PAD, terutama Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah. Rasio efektivitas Pajak Daerah selama tahun 2020–2024 selalu berada di atas 100%, yang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Selain itu, komponen Lain-Lain PAD yang Sah juga menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi, terutama didukung oleh pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sementara itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukkan tingkat efektivitas yang relatif baik meskipun kontribusinya terhadap PAD tidak sebesar komponen lainnya.

Berbeda dengan komponen PAD lainnya, efektivitas retribusi daerah masih tergolong rendah dengan rata-rata rasio sebesar 55,50%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi belum mampu mencapai target secara optimal. Rendahnya efektivitas retribusi daerah dapat dipengaruhi oleh pengelolaan dan pengawasan yang belum optimal, masih adanya potensi kebocoran penerimaan, serta sistem pemungutan yang sebagian masih bersifat manual. Meskipun demikian, rendahnya efektivitas retribusi daerah belum memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas PAD secara keseluruhan karena kontribusi terbesar PAD masih berasal dari Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah.

Capaian efektivitas PAD yang secara konsisten berada di atas 100% juga mengindikasikan bahwa penetapan target PAD masih relatif konservatif dan belum sepenuhnya mencerminkan potensi riil daerah. Selain itu, tingginya efektivitas PAD belum secara langsung mampu menurunkan tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat karena kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif lebih kecil dibandingkan pendapatan transfer. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas fiskal daerah masih perlu dioptimalkan melalui pengembangan sumber-sumber PAD yang potensial.

4.5. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah menunjukkan besarnya belanja daerah yang dikeluarkan dibandingkan dengan pendapatan daerah. Berikut ini merupakan hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah.

Tabel 13 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun 2020-2024

Tahun	Belanja Daerah (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio	Kriteria
2020	1.456.351.203.197,18	1.396.009.615.374,56	104.34%	Tidak Efisien
2021	1.382.352.867.746,57	1.419.886.218.959,26	97.36%	Efisien
2022	1464.164.668.856,05	1.500.283.093.258,05	97.59%	Efisien
2023	1.653.900.067.407,07	1.668.282.889.314,10	99.11%	Efisien
2024	1769.609.373.747.51	1.823.872.375.449,99	97.03%	Efisien
Rata-Rata			99,08%	Efisien

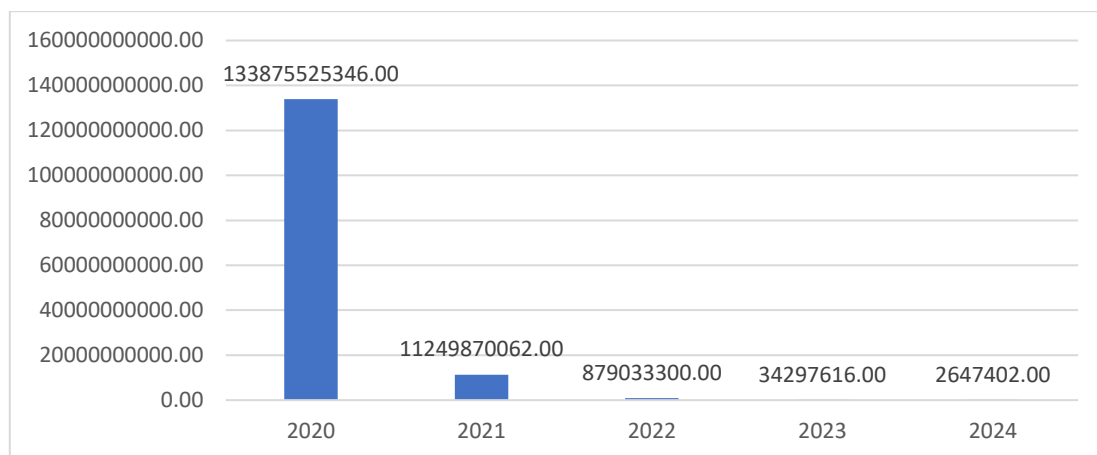
Sumber data: BKD Kota Mataram (Data diolah)

Berdasarkan Tabel diatas, rasio efisiensi keuangan daerah Kota Mataram selama tahun 2020–2024 mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 99,08% dan tergolong

efisien. Pada tahun 2020, rasio efisiensi mencapai 104,34% sehingga termasuk kategori tidak efisien karena realisasi belanja daerah lebih besar dibandingkan pendapatan daerah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya belanja tidak terduga untuk penanganan pandemi COVID-19 yang mengakibatkan defisit anggaran. Selanjutnya, rasio efisiensi mengalami perbaikan pada tahun-tahun berikutnya seiring meningkatnya pendapatan daerah dan menurunnya belanja tidak terduga pasca pandemi hingga mencapai 97,03% pada tahun 2024.

Menurut Mardiasmo (2018), efisiensi keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara optimal melalui perbandingan antara belanja dan pendapatan daerah. Semakin kecil rasio efisiensi yang dihasilkan, maka semakin efisien pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, kondisi efisiensi keuangan daerah Kota Mataram secara umum menunjukkan pengelolaan keuangan yang cukup baik meskipun masih dipengaruhi oleh dinamika belanja daerah pada periode tertentu.

Gambar 1 Realisasi Belanja Tak Terduga Kota Mataram Tahun 2020-2024



Sumber data: BKD Kota Mataram (Data diolah)

Berdasarkan Grafik diatas, belanja tidak terduga turut memengaruhi tingkat efisiensi keuangan daerah, terutama pada tahun 2020 ketika terjadi lonjakan pengeluaran akibat pandemi COVID-19. Setelah pandemi mulai terkendali, realisasi belanja tidak terduga mengalami penurunan yang signifikan sehingga rasio efisiensi keuangan daerah cenderung membaik pada tahun-tahun berikutnya. Meskipun rasio efisiensi daerah secara umum telah berada pada kategori efisien, struktur belanja daerah Kota Mataram masih didominasi oleh belanja operasi yang bersifat rutin, seperti belanja pegawai dan belanja

barang dan jasa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fleksibilitas anggaran daerah masih relatif terbatas. Selain itu, dibandingkan dengan rasio efektivitas PAD yang tergolong sangat efektif, kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan daerah belum sepenuhnya diikuti oleh pengendalian belanja yang optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kualitas pengelolaan belanja agar efisiensi keuangan daerah dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

4.6. Rasio Kesorasian Belanja Daerah

Rasio kesorasian belanja menunjukkan bagaimana pemerintah daerah dalam mengalokasikan dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Terdapat dua cara perhitungan rasio kesorasian belanja, yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Berikut ini merupakan hasil perhitungan rasio kesorasian belanja.

Tabel 14 Perhitungan Rasio Belanja Operasional Kota Mataram Tahun 2020-2024

Tahun	Belanja Operasional (Rp)	Belanja Daerah (Rp)	Rasio
2020	1.113.409.266.516,18	1.456.351.203.197,18	76,44%
2021	1.184.115.032.150,37	1.382.352.867.746,57	85,66%
2022	1.287.767.626.136,05	1.464.164.668.856,05	87,95%
2023	1.369.444.965.929,07	1.653.900.067.407,07	82,83%
2024	1.417.568.099.716,51	1.769.609.373.747,51	80,11%
Rata-Rata			82,60%

Sumber data: BKD Kota Mataram (Data diolah)

Tabel 15 Perhitungan Rasio Belanja Modal Kota Mataram Tahun 2020-2024

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Belanja Daerah (Rp)	Rasio
2020	209.066.411.335,00	1.456.351.203.197,18	14,35%
2021	185.546.615.534,20	1.382.352.867.746,57	13,42%
2022	174.005.861.795,00	1.464.164.668.856,05	11,88%
2023	281.979.453.862,00	1.653.900.067.407,07	17,06%
2024	352.038.626.629,00	1.769.609.373.747,51	19,89%
Rata-Rata			15,32%

Sumber data: BKD Kota Mataram (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 14 dan Tabel 15, struktur belanja daerah Kota Mataram selama tahun 2020–2024 masih didominasi oleh belanja operasi dibandingkan belanja modal. Rasio belanja operasi memiliki rata-rata sebesar 82,60%, sedangkan rasio belanja modal hanya sebesar 15,32%. Rasio belanja operasi mengalami peningkatan dari 76,44% pada tahun 2020 menjadi 87,95% pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 80,11% pada

tahun 2024. Sementara itu, rasio belanja modal mengalami penurunan hingga tahun 2022 sebelum kembali meningkat menjadi 19,89% pada tahun 2024.

Tingginya proporsi belanja operasi menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran daerah masih dialokasikan untuk kebutuhan rutin pemerintahan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah, dan bantuan sosial. Kondisi tersebut membatasi ruang fiskal untuk belanja yang bersifat produktif dan pembangunan jangka panjang. Sebaliknya, rendahnya proporsi belanja modal menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan produktivitas daerah belum optimal, meskipun pada tahun 2023–2024 mulai menunjukkan peningkatan seiring membaiknya kapasitas fiskal daerah.

Menurut Halim (2001), dominasi belanja operasi mencerminkan bahwa orientasi pembangunan jangka panjang belum optimal karena sebagian besar anggaran masih difokuskan pada belanja rutin dibandingkan belanja produktif. Tingginya belanja operasi juga memengaruhi fleksibilitas anggaran daerah sehingga ruang untuk meningkatkan efisiensi dan pembangunan daerah menjadi lebih terbatas. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Mataram perlu meningkatkan proporsi belanja modal secara bertahap agar pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

4.7. Rasio Pertumbuhan PAD

Perhitungan rasio pertumbuhan dilakukan untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan pendapatan dari satu periode ke periode selanjutnya apakah mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif. Berikut ini merupakan hasil perhitungan pertumbuhan:

Tabel 16 Perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD Kota Mataram Tahun 2020-2024

Tahun	PAD (Rp)	Pertumbuhan
2020	363.165.361.010,56	-
2021	392.556.124.241,49	8.09%
2022	446.332.721.389,05	13.69%
2023	493.302.232.061,10	10.53%
2024	524.644.058.354,99	6.35%

Sumber data: BKD Kota Mataram (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 16, pertumbuhan PAD Kota Mataram selama tahun 2021–2024 mengalami fluktuasi. Pertumbuhan PAD meningkat dari 8,09% pada tahun 2021

menjadi 13,69% pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 10,53% pada tahun 2023 dan kembali menurun menjadi 6,35% pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan PAD belum dapat dipertahankan secara konsisten setiap tahunnya.

Pertumbuhan PAD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber pendapatan secara berkelanjutan. Peningkatan pertumbuhan PAD pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan sumber-sumber PAD, terutama dari Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah sebagai komponen utama penyumbang PAD Kota Mataram. Namun demikian, perlambatan pertumbuhan pada tahun 2023 dan 2024 mengindikasikan bahwa kemampuan daerah dalam menciptakan sumber pendapatan baru masih relatif terbatas.

Fluktuasi pertumbuhan PAD juga dapat dipengaruhi oleh belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi daerah serta tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Berkaitan dengan rasio kemandirian dan ketergantungan fiskal sebelumnya, pertumbuhan PAD yang belum stabil menyebabkan lambatnya peningkatan kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Mataram perlu mengoptimalkan pengelolaan PAD melalui digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi daerah, pengembangan sektor ekonomi potensial, serta peningkatan efektivitas pengawasan penerimaan daerah agar pertumbuhan PAD dapat meningkat secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan daerah, kinerja keuangan Pemerintah Kota Mataram tahun 2020–2024 menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan PAD telah berjalan efektif dan pengelolaan keuangan daerah tergolong efisien, tingkat kemandirian fiskal daerah masih belum optimal. Rendahnya rasio desentralisasi fiskal, tingginya rasio ketergantungan fiskal, dan pola hubungan konsultatif pada rasio kemandirian menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, dominasi belanja operasi dibandingkan belanja modal dalam struktur belanja daerah mengindikasikan bahwa terbatasnya ruang fiskal untuk mendukung pembangunan daerah. Temuan ini mengimplikasikan bahwa peningkatan efektivitas PAD saja belum cukup untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah apabila tidak diikuti dengan peningkatan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah dan

pengelolaan struktur belanja yang lebih produktif. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah perlu diarahkan tidak hanya pada optimalisasi penerimaan daerah, tetapi juga pada penguatan kualitas belanja guna mendukung kemandirian dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Penelitian ini terbatas pada analisis kinerja keuangan daerah menggunakan rasio keuangan berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Mataram periode 2020–2024 sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh daerah. Penelitian ini adalah hanya menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif sehingga penelitian hanya menggambarkan kondisi kinerja keuangan tanpa menguji faktor-faktor yang memengaruhinya.

Pemerintah Kota Mataram perlu meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber PAD, khususnya dengan meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta menggali potensi pendapatan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, perencanaan target PAD perlu disusun secara lebih realistis agar dapat mencerminkan potensi riil daerah. Selain itu, pemerintah daerah perlu menjaga efisiensi belanja operasional dan meningkatkan proporsi belanja modal secara bertahap untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan daerah dengan menggunakan metode yang lebih luas, seperti penambahan indikator kinerja keuangan daerah atau analisis komparatif antar daerah, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Halim. (2001). Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. In *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi* (Pertama). UPP AMP YKPN.
- DJPb. (2020). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- DJPb. (2021). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- DJPb. (2022). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- DJPb. (2023). *laporan Keuangan Pemerintah pusat Tahun 2023*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- DJPb. (2024). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2024*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Eka Putri, R. S., & Munandar, A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020. *JIMEA*, 5(3), 2296–2313.
- Lantowa, F. D., & Yahya, I. W. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 6(1). <https://doi.org/10.31314/jsap.5.1.1-7.2289>
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. In *Akuntansi sektor publik* (4th ed.). UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi Publisher.
- Mohamad Mahsun. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (1st ed.). Bpfe.
- Natalia, N. M. A. S. D., & Harsono, I. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun 2019-2023. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6(2), 155–164. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i2.655>
- Pemerintah Kota Mataram. (2021). *Laporan Realisasi Anggaran Kota Mataram Tahun 2020*.
- Pemerintah Kota Mataram. (2022). *Laporan Realisasi Anggaran Kota Mataram Tahun 2021*.
- Pemerintah Kota Mataram. (2023). *Laporan Realisasi Anggaran Kota Mataram Tahun 2022*.
- Pemerintah Kota Mataram. (2024). *Laporan Realisasi Anggaran Kota Mataram Tahun 2023*.
- Pemerintah Kota Mataram. (2025). *Laporan Realisasi Anggaran Kota Mataram Tahun 2024*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. 12, Lembaran Negara Republik Indonesia (2019).
- Remanta, O., Ramadhan, P. R., & Budi, P. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Berdasarkan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi di Provinsi Sumatera Utara Oby. 05, 457–465.

- Rhamadani, S., Khulaidah, L., & Tri Sakti, F. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Periode 2020-2024 Berdasarkan Rasio Keuangan dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal. *ANALISA*, 13(3), 131–147.
- Rizal. (2022). *Desentralisasi Fiskal di Indonesia* (Muh. I. & A. K. Abdullah Igo, Murniati, Ed.). Deepublish.
- Siswanto, S., & Maylani, D. A. (2022). Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(1), 184–195. <https://doi.org/10.21831/nominal.v11i1.48423>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia 1 (2014).
- Wulandari, R., Anggun, B., Lestari, H., & Suryantara, A. B. (2023). *Analisis Rasio Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram*. (3), 56–69.